

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI DAN DALIL

6.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dan Bab V terkait penelitian mengenai kecerdasan kewargaan sebagai kerangka konseptual sistemik Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara demokratis, mengacu pada pertanyaan penelitian kesimpulan peneliti sebagai berikut

1. Kecerdasan Kewargaan didefinisikan sebagai kapasitas individu, kelompok, atau masyarakat untuk mengenali, memahami, dan mengatasi masalah sosial dan lingkungan secara adil dan efektif. Konsep ini mencakup pengelolaan pengetahuan, kolaborasi, dan tindakan bersama yang berorientasi pada kebaikan bersama, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Kecerdasan kewargaan dibagi kedalam dua domain yakni kecerdasan privat dan kecerdasan publik. Kecerdasan privat yakni kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan pribadi secara efektif. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk mengenali hak-hak, tanggung jawab, dan peluang pribadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana individu membuat keputusan yang mendukung kesejahteraan pribadi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial yang kemudian disebut dengan dimensi kewargaan legalis. Sementara kecerdasan publik menekankan kesadaran kolektif, di mana individu tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari tindakan dan keputusan mereka terhadap komunitas yang lebih luas yang kemudian dimasukkan dalam dimensi kewargaan actualis.
2. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kecerdasan Kewargaan merupakan pengembangan dari kompetensi Pendidikan Kewargaan yang ada sebelumnya, dimana kompetensi tersebut dibagi menjadi dua ranah yakni

kecerdasan privat dan kecerdasan publik. Kecerdasan Privat merupakan pengembangan dari kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan yang telah ada sebelumnya yang terdiri dari tiga sub domain antara lain **pengetahuan kewarganegaraan** (*civic knowledge*) kemampuan seseorang untuk memahami institusi, proses dan prinsip-prinsip demokrasi, dan isu-isu yang relevan tentang kewarganegaraan dalam konteks sistem pemerintahan demokratis Pancasila., **sikap dan aspirasi kewarganegaraan** (*attitude and aspiration*) merujuk pada orientasi psikologis, nilai-nilai, dan harapan individu yang mendorong partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, politik, dan komunitas. Komponen ini mencerminkan dimensi internal kewarganegaraan yang mencakup bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri sebagai bagian dari komunitas serta bagaimana mereka memotivasi diri untuk mencapai tujuan yang mendukung kepentingan bersama. Selanjutnya **keterampilan kewarganegaraan** (*civic skills*) yakni kemampuan yang dimiliki individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan publik, baik dalam konteks demokrasi maupun tanggung jawab sosial di komunitasnya. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk memahami isu-isu publik, menyampaikan pendapat secara konstruktif, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, serta mengambil tindakan untuk mendorong perubahan positif di masyarakat. Sedangkan, Kecerdasan Publik merupakan pengembangan dari kecerdasan kolektif yang terdiri dari tiga sub domain antara lain pertama **keterlibatan kewarganegaraan** (*civic engagement*) yang merujuk pada aktivitas individu atau kelompok dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memperkuat proses demokrasi, dan menciptakan perubahan sosial yang positif. Ini mencakup kontribusi langsung dalam kegiatan komunitas, pengambilan keputusan publik, serta upaya advokasi untuk kebijakan yang mendukung kepentingan umum. Kedua, **partisipasi kewarganegaraan** (*civic participation*) dipahami sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh individu untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung kehidupan bermasyarakat dan demokrasi. Ketiga **modal sosial dan relasional**

(*social and relational capital*). Modal relasional dan sosial mencerminkan kemampuan kolektivitas untuk membangun, memelihara, dan memperluas hubungan yang memberikan nilai sosial, budaya, dan emosional.

3. Dalam memudahkan menganalisa tingkat kecerdasan kewargaan, maka peneliti menyusun spektrum warga negara demokratis berdasarkan dimensi kewargaan legalis yang diklasifikasikan rendah, sedang dan tinggi dan dimensi kewargaan aktualis yang diklasifikasikan pasif, cukup dan aktif. Penyusunan spektrum ini juga dapat menjadi standar evaluasi tingkat demokratisasi warga negara, sehingga dapat mengukur sejauhmana keberhasilan penguatan kecerdasan kewargaan pada individu atau kelompok Terdapat sembilan spektrum warga negara demokratis antara lain warga negara apatis, warga negara terasing, warga negara melawan, warga negara protektif, warga negara ambivalen, warga negara penentang, warga negara strategis, warga negara reformatif dan warga negara autentik. Spektrum warga negara demokratis muncul dari interaksi yang kompleks antara berbagai faktor struktural, motivasi individu, kepercayaan terhadap institusi, dan dinamika sosial yang terus berkembang.

6.2 Implikasi

Kecerdasan Kewargaan sebagai kerangka konseptual memberikan implikasi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus memandang bahwa warga negara bukan hanya sebagai status dalam pengertian hanya menjadi objek anggota resmi komunitas nasionalnya. Pengakuan ini didasarkan pada hubungan legal antara individu dan negara, yang mencakup hak, kewajiban, dan perlindungan hukum. Dalam pendekatan ini, warga negara dipandang sebagai hubungan yuridis-politis yang mengatur posisi individu di dalam sistem hukum dan politik negara tersebut. Lebih dari itu, warga negara merupakan bagian dari perubahan sosial yang memiliki peran (*actus*) dalam berpartisipasi secara langsung dalam isu-isu sosial yang mempengaruhi masyarakat. Warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan global

mencerminkan demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menekankan pentingnya keterlibatan aktif, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana untuk memperjuangkan keadilan sosial, memperluas inklusi, dan menciptakan perubahan yang bermakna di berbagai tingkatan.

Pendekatan Kecerdasan Kewargaan (*civic intelligence*) sebagai kerangka konseptual memperluas paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dari sekadar pengakuan status yuridis warga negara menjadi pembentukan aktor sosial yang aktif dan transformatif dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa warga negara adalah agen perubahan sosial yang berperan aktif dalam demokrasi inklusif dan responsif. Dengan demikian, implikasi teoritisnya mendorong penyesuaian paradigma pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi yang hidup melalui pembelajaran yang dialogis, partisipatif, dan kontekstual. Penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan yang mendukung integrasi kecerdasan kewargaan dalam kurikulum dan pembelajaran PKn, khususnya di jenjang pendidikan tinggi. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter dan kompetensi warga negara demi penguatan demokrasi substantif di Indonesia. Kebijakan pendidikan perlu mengakomodasi pengembangan nilai, pengetahuan, keterampilan, dan sikap demokratis secara seimbang dan terukur, serta memfasilitasi partisipasi aktif warga negara dalam isu-isu sosial-politik terkini melalui teknologi dan inovasi pembelajaran. Peneliti telah merumuskan rekomendasi yang aplikatif dan terukur, seperti pengembangan kurikulum berbasis kecerdasan kewargaan yang diwarnai pembelajaran aktif dan *problem solving* isu kewarganegaraan, penggunaan instrumen asesmen holistik serta peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan dan pendampingan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan implementasi pembelajaran yang tidak hanya teoritis tetapi juga nyata dalam membentuk sikap dan perilaku demokratis yang adaptif dan partisipatif. Monitoring dan evaluasi berkala menjadi prasyarat untuk memastikan efektivitas dan relevansi pembaruan pendidikan kewarganegaraan dalam merespon dinamika sosial-politik.

6.3 Rekomendasi

Merujuk pada kesimpulan penelitian dan implikasi yang dihasilkan, penulis merekomendasikan beberapa hal kepada beberapa pihak yaitu lembaga pendidikan, masyarakat sipil dan peneliti selanjutnya.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai lembaga yang mengeluarkan pedoman pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi khususnya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung integrasi kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*) dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi dengan memberikan panduan teknis yang jelas untuk kurikulum berbasis kecerdasan kewargaan, mendorong inovasi metode pembelajaran partisipatif dan kontekstual, menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi dosen dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi pedagogik yang responsif terhadap kebutuhan demokrasi, serta menginisiasi evaluasi dan monitoring implementasi pembelajaran yang berfokus pada pembentukan warga negara yang kritis, adaptif, dan partisipatif secara berkelanjutan.

2. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud

Hasil penelitian ini dapat digunakan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran untuk mengintegrasikan kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*) dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan terutama di perguruan tinggi; merancang dan menyediakan model pembelajaran partisipatif dan kontekstual yang relevan dengan tantangan sosial-politik terkini; mengembangkan instrumen asesmen yang holistik dan terukur untuk mengukur pemahaman sekaligus keterlibatan mahasiswa; memberikan pelatihan dan

dukungan teknis berkelanjutan kepada pendidik dan pengembang kurikulum agar mampu mengimplementasikan pendekatan inovatif dan efektif; serta membangun mekanisme kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mengevaluasi secara berkala efektivitas kurikulum dan pembelajaran guna memastikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan partisipatif dalam demokrasi.

3. Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi dimana Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu Mata Kuliah Wajib Kurikulumnya direkomendasikan untuk mendesain Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (CPMK) yang berfokus pada pengembangan kecerdasan kewargaan melalui pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi membahas dan menyelesaikan isu-isu sosial, politik, ekonomi kewargaan.

4. Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diharapkan dapat merancang pembelajaran yang mendukung kecerdasan kewargaan yakni kemampuan berpikir kritis, berpartisipasi aktif, memiliki empati sosial, serta sadar akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara demokratis. Pembelajaran PKn perlu diarahkan pada pendekatan yang kontekstual, dialogis, dan berbasis problem solving, sehingga mampu membentuk warga negara yang tidak hanya memahami demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara reflektif dalam kehidupan nyata di tengah kompleksitas tantangan baik lokal, nasional maupun global.

5. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini merupakan tahap awal untuk menyusun kerangka konseptual mengenai kecerdasan kewargaan dengan berhasil menyusun kompetensi atau kapabilitas yang harus dikembangkan dalam membentuk warga negara demokratis. Penelitian ini bersifat kerangka teoritis, sehingga diperlukan langkah praktis dalam rangka menguatkan teori ini dengan meneliti secara kuantitatif tingkat kecerdasan kewargaan dan mengkaji mengenai model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang cocok untuk peningkatan Kecerdasan Kewargaan.

6.4 Rumusan Dalil Hasil Penelitian

1. Kecerdasan Kewargaan adalah kemampuan individu untuk memahami, menganalisis dan berpartisipasi dalam isu-isu publik dan proses demokrasi. Meliputi berbagai pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga, serta keterampilan untuk berinteraksi secara efektif dalam konteks sosial dan politik.
2. Resonansi Kecerdasan Kewargaan di ruang publik yang diperkuat melalui modal sosial dan relasional akan menghasilkan afinitas sosial yang berpotensi mendorong tindakan kolektif sehingga menjadi faktor penting dalam berbagai gerakan sosial dan perubahan. Namun dari resonansi kecerdasan kewargaan tidak akan terjadi tanpa adanya kepekaan warga negara (*civic consciousness*) mengenai permasalahan publik disekitarnya.
3. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pembentukan kecerdasan kewargaan meliputi kecerdasan privat yang berfokus pada kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan pribadi secara efektif. Juga kecerdasan publik yang menekankan kesadaran kolektif yang mempertimbangkan dampak dari tindakan dan keputusan mereka terhadap komunitas yang lebih luas.
4. Esensi dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi adalah Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu menghasilkan warga negara

demokratis yakni warga negara yang bukan hanya memiliki kemampuan memahami hak dan kewajiban hukum tetapi juga mampu partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

5. Seorang warga negara demokratis tidak hanya memahami konsep demokrasi, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik, sehingga bukan hanya yang mampu berpikir kritis dan menilai kebijakan secara objektif tetapi juga menentang ketidakadilan melalui cara-cara yang damai dan konstruktif.
6. Teknologi menyediakan akses informasi, ruang partisipasi digital, dan kolaborasi lintas batas, sehingga memperluas kecerdasan kewargaan dalam menghadapi tantangan baik lokal, nasional maupun global.
7. Pembelajaran yang merangsang partisipasi mahasiswa secara aktif, partisipatif dan kolaboratif sangat diperlukan agar kelak dapat berkontribusi menyelesaikan masalah sosial masyarakat, dengan demikian akan mendorong masyarakat yang responsif dan berdayasaing.

6.5 Novelty dan Perumusan Kembali Teoritisasi Kecerdasan Kewargaan Menuju Resonansi Kecerdasan Kewargaan (*Civic Intelligence Resonance Theory*)

Kecerdasan kewargaan diawali dengan *civic curiosity* yakni keingintahuan dan kepedulian warga terhadap berbagai permasalahan publik yang dihadapinya. Keingintahuan ini jika diteruskan lebih lanjut akan menimbulkan efikasi diri (*self efficacy*) yaitu keyakinan dalam diri individu untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mengelola situasi secara prospektif. Situasi prospektif yang dimaksud dalam konteks efikasi diri merujuk pada berbagai keadaan atau tantangan yang mungkin dihadapi individu di masa depan, di mana mereka perlu menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kompetensi kecerdasan kewargaan baik yakni pengetahuan, keterampilan, sikap dan aspirasi yang dimiliki oleh individu dapat menghasilkan *pro-active participation* yang adil dan demokratis.

Dalam memperluas gagasan kecerdasan kewargaan menjadi alat pemecahan masalah publik, diperlukan resonansi kecerdasan kewargaan. Merujuk pada teori Resonansi sebagai fenomena sosial (Miller, V : 2015) yang menyatakan bahwa resonansi melibatkan interaksi antara individu dan konteks sosial mereka. Ini berarti bahwa resonansi tidak hanya terjadi di dalam diri individu, tetapi juga dalam hubungan mereka dengan orang lain dan lingkungan di sekitar mereka. Interaksi ini menciptakan ruang bagi pengalaman bersama yang memperkuat rasa keterhubungan.

Sehingga, peneliti mengusulkan teori Resonansi Kecerdasan Kewargaan (*Civic Intelligence Resonance Theory*). Resonansi Kecerdasan Kewargaan di ruang publik yang diperkuat melalui modal sosial dan relasional akan menghasilkan *afinitas sosial* yakni hubungan atau keterikatan yang kuat antara individu dan kelompok atau komunitas tertentu. Resonansi kecerdasan kewargaan memiliki potensi untuk mendorong tindakan kolektif sehingga menjadi faktor penting dalam berbagai gerakan sosial dan perubahan.

Sebagai contoh komunitas yang peduli terhadap isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan membentuk kelompok aktivis. Mereka memiliki afinitas terhadap pelestarian alam dan berkolaborasi dalam kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan mengadvokasi kebijakan ramah lingkungan. Keterikatan ini mendorong mereka untuk melakukan aksi bersama, seperti demonstrasi atau program edukasi. Selain itu, kelompok yang terdiri dari individu dengan latar belakang berbeda yang memiliki afinitas terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia. Mereka terlibat dalam aksi protes untuk menuntut perlindungan hak-hak minoritas, seperti gerakan *Black Lives Matter*. Afinitas ini mendorong mereka untuk bersatu dalam memperjuangkan perubahan kebijakan dan kesadaran publik.

Ketika individu merasakan resonansi dalam pengalaman bersama, mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam tindakan yang mendukung tujuan bersama, baik dalam konteks sosial, politik, maupun budaya. Ini menunjukkan bahwa resonansi dapat menjadi pendorong penting dalam gerakan sosial dan perubahan.

Ada 4 faktor yang dapat meresonansi kecerdasan kewargaan baik pada level individu, kelompok atau masyarakat adalah pendidikan, akses informasi komunikasi, pengalaman praktis, dan lingkungan sosial.

1. Pendidikan memungkinkan warga dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dan mendorong tanggung jawab sosial.
2. Akses informasi komunikasi dapat meningkatkan kesadaran warga tentang isu-isu publik yang relevan dan memperkaya perspektif kewargaan melalui forum diskusi baik online maupun offline.
3. Pengalaman praktis seperti partisipasi dalam komunitas, relawan atau proyek sosial membantu warga memahami dinamika sosial politik.
4. Lingkungan sosial membentuk sikap kewargaan melalui nilai-nilai empati, keberanian dan tanggung jawab sehingga warga memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan kewargaan.

Namun dari resonansi kecerdasan kewargaan tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran warga negara (*civic consciousness*) mengenai permasalahan publik disekitarnya. Kesadaran kewargaan merupakan kesadaran kolektif yang menjadi fondasi untuk memicu keinginan dan kemampuan untuk bertindak. Jika warga sadar akan ancaman penyakit menular (*civic consciousness*), mereka akan mencari informasi (*civic curiosity*), mengambil tindakan pencegahan (*self-efficacy*), dan berkolaborasi dengan pemerintah/organisasi. Resonansi terjadi ketika kolaborasi ini menciptakan solusi inovatif (misalnya, kampanye vaksinasi massal).